

**LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah
Untuk Periode Laporan Yang Berakhir 30 Juni 2023



Jl. Poros Palu Kulawi Km 17 Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi Sulawesi Tengah

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Audited ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sigi, Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran ,

Dr. Femmi Nor Fahmi, SP., M.SI
NIP. 19691112 199903 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.4. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

- D.3. Beban Persediaan
- D.4. Beban Barang dan Jasa
- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH**

Alamat : JL. Poros Palu Kulawi Km. 17 Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah
Telpon/Faksimile : 0451- 4013202 , Website : sulteng.litbang.go.id,
Email : bptpsulteng@yahoo.com - bptpsulteng@pertanian.go.id



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Audited tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sigi, Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran ,

Dr. Femmi Nor Fahmi, SP., M.SI
NIP. 19691112 199903 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp63,867,266.00 atau mencapai 118,05% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp54,104,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp8,342,979,993.00 atau mencapai 97.86% dari alokasi anggaran sebesar Rp8,525,506,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp70,245,126,155.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp671,432,000.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp69,029,878,961.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp543,815,194.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp70.245.126,155.00 dan Rp70.245.126,155.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp55,121,373.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp9,424,157,606.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-9,369,036,233.00 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp0.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9,369,036,233.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp71,355,049,661.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-9,369,036,233.00

kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8,279,112,727.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp70,245,126,155.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 JUNI 2023 dan 30 JUNI 2022**

Uraian	Catatan	30 Juni 2023			30 JUNI 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	93,189,000.00	37,046,420.00	40.00	23,883,773.00
Jumlah Pendapatan		93,189,000.00	37,046,420.00	40.05	23,883,773.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	3,912,449,000.00	1,988,769,632.00	51.00	2,368,848,766.00
Belanja Barang	B.4.	4,169,282,000.00	1,207,230,438.00	29.00	1,497,945,567.00
Belanja Modal	B.5.	2,478,826,000.00	5,620,950.00	00.00	12,100,000.00
Jumlah Belanja		10,560,557,000.00	3,201,621,020.00	30.00	3,866,794,333.00

II. NERACA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH NERACA

PER 30 JUNI 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0.00	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	0.00	0.00
Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	0.00	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.4.	0.00	0.00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5.	0.00	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6.	0.00	0.00
Persediaan	C.1.7.	66.912,000.00	671,432,000.00
Jumlah Aset Lancar		66.912,000.00	671,432,000.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	54,536,755,000.00	49,972,476,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	12,544,535,297.00	12,544,535,297.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	17,540,348,082.00	17,540,348,082.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2,626,796,102.00	2,626,796,102.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5.	6,620,950.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-13,654,276,520.00	-13,654,276,520.00
Jumlah Aset Tetap		69,035,499,911.00	69,029,878,961.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	19,964,473.00	19,964,473.00
Aset Lain-lain	C.4.2.	3,258,435,294.00	3,258,435,294.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-2,734,584,573.00	-2,734,584,573.00
Jumlah Aset Lainnya		543,815,194.00	543,815,194.00
Jumlah Aset		70,310,836,266.00	70,245,126,155.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	207,239,480.00	0.00
Hibah Yang Belum Disahkan	C.5.2.	(4,564,279,000)	
Uang Muka dari KPPN	C.5.3.	60.000.000.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		(4,296,985,520.00)	0.00
Jumlah Kewajiban		(4,296,985,520.00)	0.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	74,607,821,786.00	70,245,126,155.00
Jumlah Ekuitas		74,607,821,786.00	70,245,126,155.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		70,310,836,266.00	70,245,126,155.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SULAWESI TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 dan 30 JUNI 2022**

Uraian	Catatan	30 Juni 2023	30 JUNI 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	37,135,581.00	15,395,360.00
JUMLAH PENDAPATAN		37,135,581.00	15,395,360.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2,196,063,112.00	2,971,176,984.00
Beban Persediaan	D.3.	68,952,900.00	221,743,050.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	695,034,217.00	738,160,311.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	270,761,533.00	314,048,002.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	172,481,788.00	246,519,204.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	0.00	763,866,782.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	0.00	15,812,979.80
JUMLAH BEBAN		3,403,293,550.00	5,271,327,312.80
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-3,363,157,969.00	-5,255,931,952.80
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0.00	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0.00	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0.00	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT – LO		-3,366,157,969.00	-5,255,931,952.80

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 dan 30 JUNI 2022**

Uraian	Catatan	30 Juni 2023	30 JUNI 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	70,245,126,155.00	71.335,049,661.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-3,366,157,969.00	-5,255,931,952.80
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0.00	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	0.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	7,728,853,600.00	3,842,910,560.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	4,362,695,631.00	-1.413,021,392.80
EKUITAS AKHIR	E.6.	74,607,821,786.00	69,922,028,268.20

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut BPSIP Sulawesi Tengah adalah UPT BSIP yang melaksanakan penerapan dan diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi. BPSIP berada dibawah BSIP dan bertanggungjawab kepada Kepala BPSIP Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala.

Berdasarkan Perpres No. 117 Tahun 2022 tugas BSIP adalah Menyelenggarakan Koordinasi Perumusan, Penerapan, dan Pemeliharaan,serta Harmonisasi Standar Instrumen di Bidang Pertanian.

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrument di bidang pertanian
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harminisasi standar instrument di bidang pertanian
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Sebagai Unit Kerja Eselon 1 baru di Kementerian Pertanian, BSIP melaksanakan Transformasi dan Reorientasi Manajemen (SDM, Kelembagaan); membangun dan meningkatkan Jejaring kerja sama, dan Reinvestasi Infrastruktur

Tugas dan Fungsi BPSIP Sulawesi Tengah

BPSIP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi. Pelaksanaan tugas BPSIP Sulawesi Tengah dikoordinasikan oleh Kepala BBPSIP. Dalam melaksanakan tugas BPSIP Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- b. Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi kebutuhan satndar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

- c. Pelaksanaan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- d. Pelaksanaan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- e. Pelaksanaan Penyusunan Model Penerapan dan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- f. Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standarisasi Pertanian Spesifik Lokasi
- g. Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- h. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- i. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga BPSIP

BPSIP Sulawesi Tengah terdiri dari :

- a. Sub bagian Tata Usaha dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik Negara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (ASET TETAP)/(SIMAK-BMN/ASET). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan

Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	204,104,000.00	54,104,000.00
Jumlah Pendapatan	204,104,000.00	54,104,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.836.949.000.00	1.244.375,000.00
Belanja Lembur	75.500,000.00	14.550,000.00
Belanja Barang Operasional	1.129.464.000.00	304.016,000.00
Belanja Barang Non Operasional	43.500,000.00	0.00
Belanja Barang Persediaan	61.500.000.00	0.00
Belanja Jasa	386.400,000.00	72.198,000.00
Belanja Pemeliharaan	667.136,000.00	100.248,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0.00	80.000.000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	615.000.000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
Jumlah Belanja	9,569,150,000.00	8,525,506,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp63,867,266.00 atau mencapai 118.05% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp54,104,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	88.689.000.00	46.366.700.00	52.33
Pendapatan Lain-Lain	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4.500.000.00	0.00	0.00
Jumlah	93,189,000.00	46,406,620.00	52,23

Realisasi Pendapatan TA 2023 pada LRA penerimaan negara bukan pajak Rp63.867.266.00 berbeda dengan pendapatan negara bukan pajak pada Laporan Operasional (LO) Rp55.121.373.00 dan selisih sebesar Rp8.745.893 merupakan penyeteroran pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 18.53% yang diakibatkan pasca gempa saluran air untuk penyiraman mengalami kerusakan dan kekeringan dibandingkan TA 2021. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0.00	8.745.893.00	0.00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	46.366.700.00	13,039.880.00	14.90
Pendapatan Denda	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Lain-Lain	0.00	0.00	36.89
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0.00	2.098.000.00	10.04
Jumlah	46.366.700.00	23,883,773.00	18.53

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada Semester I TA.2023 adalah sebesar Rp8,342,99,993.00 atau 97.86% dari anggaran belanja sebesar Rp8,525,506,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA.2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023

Uraian	TA. 2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3.912.449.000.00	1.988.769.632.00	50.83
Belanja Barang	4.089.900.000.00	1.325.159.658.00	32.4
Belanja Modal	2.478.826.000.00	5.620.950.00	0.23
Total Belanja Kotor	10.481.175,000.00	3.319.550.240.00	31.67
Pengembalian Belanja		0.00	0.00
Total Belanja	10.560.557,000.00	3.319.550.240.00	31.43

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -8.01% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya pegawai yang purna bakti dan adanya peralihan 13 pegawai pindah ke Institusi Badan Riset Nasional/BRIN

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	.%
Belanja Pegawai	1.988.769.632.00	2,368,848,716.00	-8.58
Belanja Barang	1.325.159.658.00	1,497,945,567.00	-7.69
Belanja Modal	5.620.950.00	0.00	5.71
Total Belanja	3.319.550.240.00	3,866,794.367.00	-8.01

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4,450,705,477.00 dan Rp5,185,762,268.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -8.58% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang dihentikan gajinya berhubung pensiun dan adanya pegawai yang pindah ke BRIN.sebanyak 13 tenaga fungsional.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.963.112.632.00	2,353,856,800.00	-8.68
Belanja Lembur	25.657.000.00	14.992,000.00	5.47
Jumlah Belanja Kotor	1.988.769.632.00	2,368,848,800.00	-3.22
Pengembalian Belanja Pegawai	0.00	34.00	-8.59
Jumlah Belanja	1.988.769.632.00	2,368,848,766.00	-8.58

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

masing-masing sebesar Rp3,493,740,711.00 dan Rp4,539,037,116.00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar -7.69% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya refocusing pengurangan anggaran pada belanja barang non operasional dan belanja perjalanan

Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	540.405.070.00	317,353,964.00	1.03
Belanja Barang Non Operasional	116.817.150.00	322,147,000.00	-5.89
Belanja Barang Persediaan	68.952.900.00	199,218,050.00	-5.01
Belanja Jasa	128.214.347.00	98,659,347.00	-5.28
Belanja Pemeliharaan	271.806.533.00	314,048,002.00	-5.01
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	198.963.658.00	246,519,204.00	-8.29
Jumlah Belanja Kotor	1.325.159.658.00	1,497,945,567.00	-7.69
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	1.325.159.658.00	1,497,945,567.00	-19.66

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp398,533,805.00 dan Rp697,426,000.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 0.00% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pengalokasian dana belanja modal di tahun 2023 berupa pembuatan pagar kawat duri semi permanen dan pembuatan 1 unit pos satpam.

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2023 dan 31 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.620.950.00	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	5.620.950.00	0.00	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	5.620.950.00	0.00	0.00

B.5.1. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp398,533,805.00 dan Rp0.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 tidak mengalami penurunan sebesar 0.00% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Belanja modal Gedung dan Bangunan, terdiri dari Pembuatan Pagar Permanen di Kantor BPSIP Sulteng yang baru senilai Rp1.863,826,000.00.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.620.950.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	5.620.950.00	0.00	0.00
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	5.620.950.00	0.00	0.00

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 tidak ada mengalami penurunan atau kenaikan, dikarenakan tidak ada alokasi dan untuk menjadi pembandingnya di TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Terdapat pengalokasian belanja modal pembelian peralatan dan mesin di tahun 2023

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 30 Juni 2023 dan 31 Juni 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	0.00	0.00	0.00

B.5.2. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 tidak ada mengalami penurunan ataupun kenaikan dikarenakan tidak ada pembandingnya di TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Tidak adanya pengalokasian belanja modal untuk belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	0.00	0.00	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp60.000.000.00 dan Rp0.00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP senilai Rp60.000.000.00 dan sisa TUP senilai Rp62.798.920.00 dan uang Jasa Giro bank Rp0,00 yang telah dipertanggungjawabkan atau telah disetorkan Uang Persediaan (UP) tanggal 13 Desember 2022 dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tanggal 29 Desember 2022 ke Kas Negara melalui pihak Bank Negara Indonesia per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2023
Uang Tunai di Kas	60.000.000.00
Uang di Rekening Bank	0.00
Jumlah	0.00

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp27,804,857.00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang telah diselesaikan pada tanggal neraca yang telah lunas dalam 12 bulan atau kurang . Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2023

No	Nama Debitur	30 Juni 2023
1.	Piutang CV Angkasa Raya yang belum tuntas dan telah dilimpahkan ke KPKNL Palu	89.161.00
	Jumlah	89.161.00

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur namun namun muncul di neraca dan telah berkoordinasi dengan pihak KPPN Palu serta Eselon I Badan Litbang, hal ini pada periode 13 dilakukan penjournalan atas nilai tersebut dan nilai tersebut telah dilakukan pelunasan melalui setoran dan adanya keringanan melalui crash program. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 30 Juni 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Macet	0.00	0%	0.00
Jumlah	27,804,857.00		0.00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp66.912,000.00 dan Rp671.432,000.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Bahan Baku (benih jagung lebel putih)	66.912,000.00	16,632,000.00
Persediaan Lainnya (ternak sapi)	0.00	654,800,000.00
Jumlah	66.912.000.00	671.432,000.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp54.536.755,000.00 dan Rp49,972,476,000.00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12,544,535,297.00 dan Rp12,544,535,297.00.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17,540,348,082.00 dan Rp17,540,348,082.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	17,540,348,082.00
Mutasi Tambah	
Pengadaan	0.00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0.00
Saldo per 30 Juni 2023	17,540,348,082.00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	-1,977,470,744.00
Nilai Buku per 30 Juni 2023	15,562,877,338.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Mutasi tambah berupa pembuatan pagar permanen senilai Rp0.00
2. Pengurangan adanya akumulasi penyusutan..

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,626,796,102.00 dan Rp2,626,796,102.00.

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.620.950.00 dan Rp0.00. yang merupakan pembuatan pagar permanen termasuk dalam kelompok pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya telah selesai dan telah menjadi aset tetap

sampai dengan tanggal neraca. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari pembuatan Pagar Permanen senilai Rp.00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-13.654.276.520.00 dan Rp-12,966,905,057.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	12,544,535,297.00	-10,973,832,286.00	1,570,703,011.00
2.	Gedung dan Bangunan	17,540,348,082.00	-1,977,470,744.00	15,562,877,338.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,626,796,102.00	-702,973,737.00	1,923,822,365.00
Akumulasi Penyusutan		30,347.562.910.00	-13,654,276,403.00	19,744,774,424.00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19,964,473.00 dan Rp19,964,473.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	19,964,473.00
Jumlah	19,964,473.00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3,258,435,294.00 dan Rp3,258,435,294.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Juni 2023	3.258,435,294.00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0.00
Saldo per 30 Juni 2023	3,258,435,294.00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	-2,714,620,100.00
Nilai Buku per 30 Juni 2023	543,815.194.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Tidak ada mutasi tambah Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya
2. Mutasi pengurangan adanya penyusutan

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-19.964.473.00 dan Rp-19.964.473.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	19,964,473.00	-19,964,473.00	0.00
2.	Aset Lain-lain	3,258,435,294.00	-2,714,620,100.00	0.00
Akumulasi Penyusutan		3,278,399,767.00	-2,734,584,573.00	543,815,194.00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas periode per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp70,003.301.786.00 dan Rp69.922.028.268.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp46.495.781.00 dan Rp15.395.360.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0.00	2.375.200.00	0.00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	17.413.00	0.00	0.00
Pendapatan Penyelesaian Ganti kerugian Negara terhadap pihak lain	0.00	7.406.882.00	.8.46
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	3.919.000.00	900,000.00	2.29
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	1.500,000.00	4,500,000.00	-3.33
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.700,000.00	1.200,000.00	7.05
Pendapatan Pemindahtanganan bmn lainnya	0.00	312.599.000.00	0.00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	45.316,000.00	11,997,000.00	26.47
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,668,960.00	3,678,880.00	-1.37
Jumlah	55,121,373.00	334,656,962.00	-19.08

Pendapatan bersumber dari penyeteroran dan pemotongan SPM gedung dan bangunan yang berasal dari sewa rumah dinas, pendapatan penjualan hasil pertanian/perkebunan/peternakan, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi, termasuk pendapatan penyelesaian ganti rugi TP/TGR keseluruhan jumlah pada LRA sebesar Rp63.867.266.00 sedangkan pendapatan negara pada LO senilai Rp46.495.781 sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.745.893.00 yang berasal setoran pelunasan tp/tgr dari nilai pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4,450,705,526.00 dan Rp5.185,762,268.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.525.973.400.00	2,745,632,400.00	-3.64
Beban Pembulatan Gaji PNS	22.586.00	38,004.00	7.78
Beban Tunj. Anak PNS	30.972.870.00	47,327,036.00	-0.42
Beban Tunj. Beras PNS	82.269.120.00	140,132,700.00	17.99
Beban Tunj. Fungsional PNS	239.880.000.00	490,000,000.00	2.44
Beban Tunj. PPh PNS	9.141.766.00	18,117,230.00	-7.27
Beban Tunj. Struktural PNS	6.120.000.00	13,680,000.00	-46.85
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	100.518.370.00	165,137,460.00	-3.71
Beban Tunjangan Umum PNS	25.495.000.00	53,150,000.00	-21.67
Beban Uang Lembur	25.657.000.00	47,884,000.00	3.68
Beban Uang Makan PNS	150.013.000.00	320,606,000.00	-8.75
Jumlah	4,450,705,526.00	5,185,762,268.00	-3.22

Beban belanja pegawai atas kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang yang diberikan pada pegawai BPTP Sulawesi Tengah yang berjumlah 49 orang yang terdiri Gol IV 5 orang, Gol III 30 orang dan Gol II 14 orang. Ada perbedaan untuk beban belanja pegawai pada LO senilai Rp4.450.705.477.00 sedangkan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp4.450.705.526.00, selisih perbedaan sebesar Rp49.00 tersebut merupakan belanja pembulatan gaji pegawai.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp671,432,000.00 dan Rp664.673,000.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik

yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2023 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	16,632,000.00	9,873,000.00	-81.72
Beban Persediaan konsumsi	0.00	0.00	-43.90
Beban persediaan lainnya	654.800,000.00	654.800,000.00	6.20
Jumlah	671,432,000.00	664,673,000.00	-61.68

Beban persediaan bahan baku bersumber dari kegiatan pengkajian spesiik lokasi di wilayah Sulawesi Tengah , untuk beban persediaan bahan baku berupa benih Jagung unggul lebel putih 1.188 kg aRp14.000.00 , sedangkan beban persediaan lainnya berupa ternak sapi indukan betina 20 ekor, dan sapi bakalan (jantan) sebanyak 40 ekor yang telah dilakukan pelelangan namun belum dilakukan penghapusan berhubung menunggu persetujuan di pusat.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,891,539,252.00 dan Rp1,973,585,204.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	88,039,000.00	23,190,750.00	-89.43
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	42,000,000.00	357,638,800.00	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	654,670,150.00	686,614,470.00	27.34
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	144,000,000.00	81,000,000.00	12.50
Beban Honor Output Kegiatan	35,700,000.00	40,725,000.00	-32.90
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.860.000.00	68,940,000.00	0.00
Beban Jasa Profesi	2,700,000.00	7,100,000.00	-87.23
Beban Keperluan Perkantoran	690,740,482.00	448,149,154.00	5.44

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Langganan Listrik	171,829,920.00	223,585,825.00	-9.96
Beban Langganan Telepon	60,000,00.00	36,641,205.00	-28.27
Jumlah	1,891,539,252.00	1,973,585,204.00	18.09

Beban barang dan jasa merupakan beban yang terjadi untuk mendukung kegiatan pengkajian di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp935,215,844.00 dan Rp823,579,537.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	405,268,900.00	226,117,550.00	-17.91
Beban Pemeliharaan Jaringan	5,998,250.00	6,000,000.00	16.44
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	508,053,694.00	295,826,025.00	-29.60
Jumlah	935,215,844.00	823,579,537.00	-24.67

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk mendukung kegiatan di BPTP Sulawesi Tengah dalam rangka menunjang pelaksanaan tupoksi.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp420,411,415.00 dan Rp431,638,383.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	401,601,415.00	321,100,483.00	-31.08
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	92,797,900.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,810,000.00	17,740,000.00	-48.96
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0.00	0.00	-100.00
Jumlah	420,411,415.00	431,638,383.00	-18.03

Beban perjalanan merupakan beban yang terjadi untuk mendukung kegiatan di BPTP Sulawesi Tengah dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp763,866,762.00 dan Rp828,522,904.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut: Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi

per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	192,903,169.00	192,870,043.00	42.61
Beban Penyusutan Irigasi	10,061,094.00	10,061,094.00	147.93
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18,814,425.00	8,882,625.00	3,008.07
Beban Penyusutan Jaringan	28,982,982.00	28,982,982.00	1.48
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	21,453,062.00	36,011,677.00	-29.24
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	491,652,050.00	551,714,483.00	-15.11
Jumlah	763,866,782.00	828,522,904.00	-4.66

Beban Penyusutan yang terdiri dari Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan tertuang pada Aplikasi Simak bmn.

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.745,893.00 dan Rp-7,406,882.00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-8,745,893.00	-7.406.882.00	0.00
Jumlah	-8,745,893.00	-7.406.882.00	0.00

Beban Penyisihan Piutang tak tertagih telah terselesaikan dan lunas telah disetorkan pada tanggal 15 Maret 2022 an.CV. Angkasa Raya

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Keg. Non Operasional TA.2023 & 2022 adalah sbb:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00	0.00	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.000
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0.00	0.00	0.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belj Pegawai TA. Yang Lalu	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

adalah masing-masing sebesar Rp71,335,049,661.00 dan Rp72,215,337,108.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-9.369,036,233.00 dan Rp-10,962,396,345.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp4.540.476.00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp4.540.476.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 14 yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8,279,112,727.00 dan Rp10,077,568,422.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2023.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Juni 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	8,342,979,993.00
Diterima dari Entitas Lain	-63,867,266.00
Jumlah	8,279,112,727.00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 Juni 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp-63,867,2666.00 sedangkan DKEL sebesar Rp8,342.979,993.00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 14 per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp70,249,126.155.00 dan Rp71,335,049,661.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

1. Proses tindaklanjut pengajuan pengelolaan BMN baik berupa Penghapusan BMN pada satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah telah diterbitkan Sekjen Kementerian Pertanian meliputi :
 - a. SK Penghapusan BMN berupa Ternak Sapi yang mati
 - b. SK Penghapusan Hasil Lelang BMN berupa Ternak Sapi
2. Telah dilakukan perubahan Nomenklatur Aset Tanah Sejumlah 3 (tiga) bidang tanah yang berlokasi di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi sebanyak 2 (dua) bidang tanah dan berlokasi di Desa Sidondo Kec Sigi Biromaru Kab Sigi sebanyak 1 (satu) bidang tanah berupa Perubahan Nama Sertifikta Tanah Hak Pakai dari Atas Nama Kementerian Pertanian menjadi Atas Nama Pemerintah RI pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi. Telah dilakukan penggantian blanko sertifikat tanah yang telah dirubah Hak Pakai dari Atas Nama Kementerian Pertanian menjadi Atas Nama Pemerintah RI pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi.
3. Telah melakukan update data tanah berupa pencatatan data tanah berdasarkan dokumen sertifikat dan melakukan upload soft file sertifikat tanah serta penentuan gps lokasi tanah pemerinta tersbut pada aplikasi SIMAN
4. Telah terbit nomor register Tanah Hibah dari Pemda Kab Sigi ke BPTP SULAWESI TENGAH sebagai dasar pencatatan aset tetap pada aplikasi SIMAN dan Sakti. Tanah Hibah dengan nomor register 2RBS5W4A dengan nilai hibah Rp. 4.564.29.000,- .
5. Telah dilakukan pencatatan pada menu Hibah Masuk berupa Hibah Tanah dari Pemda Kab. Sigi dengan luas 26440 M2 berlokasi di Desa Maku, Kec Dolo, Kab. Sigi senilai Rp. 4.564.29.000,- dengan nomor Register 2RBS5W4A pada aplikasi SAKTI (Aset Tetap) pada satuan kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah kode satker 567673 pada tanggal 29 Maret 2023. BAST atas Hibah Tanah (BAST TAYL), jurnal tidak tebetuk di GLP (SAKTI) sehingga menimbulkan akun minus dan menunggu konfirmasi melalui HAI KPPN.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Pegawai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah mempunyai Jumlah dan Komposisi Pegawai per 30 Juni 2023 sebanyak 43 Pegawai yang terdiri sebagai berikut :

1. Kelompok Peneliti 10 orang
 - a. Peneliti Golongan IV sebanyak 1 Orang
 - b. Peneliti Golongan III sebanyak 9 orang
2. Kelompok Penyuluh 13 orang
 - a. Penyuluh Golongan IV sebanyak 4 orang
 - b. Penyuluh Golongan III sebanyak 9 orang
3. Kelompok Litkayasa 4 orang
 - a. Litkayasa Golongan II 3 Org dan Gol III sebanyak 1 orang
4. Kelompok Fungsional Umum 4 orang
 - a. Analisis kepegawaian Golongan III sebanyak 1 orang
 - b. Fungsional Pustakawan Golongan III sebanyak 1 orang
 - c. Fungsional Keuangan sebanyak Gol II sebanyak 2 orang

Sigi, 30 Juni 2023

Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang,



Dr. Femmi Nor Fahmi, SP., M.Si
NIP. 19691125 199903 2 001